

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan komoditas yang menarik karena selain memberikan manfaat kesehatan, olahraga dapat menjadi sumber pendapatan signifikan bagi suatu negara. Misalnya olahraga kendaraan bermotor seperti Formula 1, MotoGP, dan World Rally Championship yang tak hanya meningkatkan persaingan, olahraga kendaraan bermotor ini telah menjadi sektor ekonomi bernilai miliaran yang berdampak pada perkembangan infrastruktur pariwisata, menarik perhatian media global, dan mendiversifikasi ekonomi lokal (FIA, 2024). Para penggemar olahraga suatu negara mampu menunjukkan kesediaan untuk melakukan perjalanan jauh demi mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan partisipasi dalam acara internasional. Dengan hal ini olahraga menjadi komoditas menarik dan sejalan dengan konsep kekuatan lunak (*soft power*). Kekuatan lunak menjadi gagasan sebuah negara untuk melakukan pendekatan melalui budaya, nilai, dan kebijakan (Melissen, 2005). Salah satu olahraga yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi publik di bidang otomotif adalah acara olahraga balap Formula 1 (F1). Diplomasi publik merupakan sebuah cara untuk mempengaruhi orang lain tanpa adanya paksaan untuk terlibat dengan masyarakat asing (Nye, 2008).

F1 bertransformasi menjadi bisnis bernilai miliaran dolar yang melibatkan beberapa aktor seperti pemerintahan, sponsor, hingga organisasi internasional seperti Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Sejak tahun 1970-an, Bernie Ecclestone merombak sistem pengelolaan hak komersil yang dimiliki oleh F1. Bernie Ecclestone melakukan perubahan untuk kesepakatan komersil televisi hiburan, biaya penyelenggaraan, dan kontrak sponsor yang menjadikan F1 tidak hanya menjadi ajang olahraga balap namun juga

menjadi kekuatan komersil global yang menjadikannya dikenal sebagai pemilik hak komersil F1 (Bhambwani, 2023).

F1 telah menjadi balapan mobil bergengsi yang telah memikat daya tarik global. Tidak hanya bergerak sebagai wadah untuk berkompetisi mesin otomotif, F1 juga merangkap sebagai alat strategis bagi negara-negara di mana balapan ini diselenggarakan untuk alat diplomasi dalam meningkatkan daya tarik dari sisi pariwisata hingga ekonomi dan narasi politik pada pandangan internasional (Dong, 2024). Dalam beberapa dekade pergelaran balapan, beberapa negara memilih untuk menggunakan F1 sebagai alat yang dapat digunakan sebagai diplomasi publik. Masuknya F1 ke dalam pasar Timur Tengah dimulai dari diadakannya Bahrain Grand Prix di Sirkuit Sakhir pada tahun 2004 dengan jumlah penonton yang memecahkan rekor melebihi 32.000 orang serta dampak ekonomi tahunan dari balapan ini diperkirakan mencapai \$300 juta (EDB Bahrain, 2015).

Keuntungan yang didapatkan dari olahraga balap ini kemudian menimbulkan pemicu dari banyaknya negara untuk menjadi tuan rumah dari *event* ini termasuk Uni Emirat Arab (UEA) yang telah dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan minyak dengan Abu Dhabi sebagai kontributor utama bagi perekonomian negara (Grand Prix Experience, 2022). Pada tahun 2006, pemerintah UEA membuat kebijakan untuk mengembangkan Pulau Yas yang terletak di sebelah timur Abu Dhabi untuk menjadi tujuan wisata baru dengan sebagian besar rencana berpusat pada pembangunan trek balap sepanjang 5,5 kilometer (Formula 1, 2025).

F1 Grand Prix yang diselenggarakan di berbagai kota lintas benua memerlukan biaya penyelenggaraan. Bagi setiap negara yang menginginkan posisi sebagai tuan rumah ajang olahraga balap ini memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah biaya kontrak untuk memperbolehkan negara melaksanakan acara ini dengan pemegang hak komersil F1 yaitu FIA sebelum menyelenggarakan F1 di negaranya. Dengan isi kontrak yang berbeda-beda,

terdapat negara yang memiliki kontrak dengan jangka waktu panjang dan pendek selama negara tersebut menjadi tuan rumah (Larasati, 2024). Beberapa contoh diantaranya ialah Azerbaijan dengan kontrak hingga 2034 mengeluarkan sejumlah uang \$57 juta untuk melaksanakan F1 di Sirkuit Baku, Qatar dengan kontrak hingga tahun 2032 mengeluarkan uang sebesar \$55 juta untuk melaksanakan F1 di Sirkuit Losail, dan Bahrain dengan kontrak hingga tahun 2036 harus mengeluarkan uang sebesar \$52 juta dengan kontrak hingga tahun 2036 untuk melaksanakan F1 di Sirkuit Sakhir. Sedangkan UEA dengan sirkuit Yas Marinanya mengeluarkan uang sejumlah \$42 juta dengan kontrak hingga tahun 2030 (Racing New 365, 2023).

Ecclestone, sebagai pemilik hak komersial F1, menandatangani perjanjian yang memberikan Abu Dhabi hak untuk menjadi tuan rumah balapan selama tujuh tahun dimulai dari tahun 2009 dengan Jenderal Shaikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA. Rencana untuk menjadi tuan rumah Grand Prix F1 di Pulau Yas merupakan bagian dari proyek senilai \$40 miliar untuk mengubah pulau Yas menjadi tujuan wisata utama (Khaleej Times, 2007). Para pekerja memulai pembangunan sirkuit ini pada bulan Mei 2007 dan menyelesaikan proyek sirkuit pada bulan Oktober 2009. Sirkuit ini kemudian dinamai dengan nama Sirkuit Yas Marina (Formula 1, 2025).



**Gambar 1. 1** Presiden Sheikh Mohammed, yang saat itu menjabat sebagai Putra Mahkota Abu Dhabi, Bersama para pembalap Formula 1 di depan hotel Emirates Palace.

Sumber: (The National, 2024)

Dipilihnya acara olahraga besar F1 dikarenakan UEA memiliki ambisi untuk menghasilkan peluang profit di bidang pariwisata. Keuntungan yang dimenangkan bagi UEA untuk menjadi tuan rumah pergelaran olahraga balap ini dianggap dapat menjadi sesuatu yang menghasilkan dampak ekonomi yang positif bagi UEA. Kesepakatan yang terjadi menjanjikan keuntungan bagi seluruh aspek industri pariwisata Abu Dhabi (Arabian Business, 2007). UEA mengatakan bahwa olahraga telah menjadi strategi untuk promosi pariwisata dan mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi melalui investasi optimal dalam proyek-proyek pembangunan kelas dunia dengan menempatkan UEA sebagai salah satu destinasi paling terkemuka di peta pariwisata regional dan internasional (Gulf News, 2018).

Setelah satu dekade menjadi tuan rumah Formula 1, Uni Emirat Arab kembali memperkuat komitmennya terhadap olahraga yang dilaksanakan di Yas Marina sirkuit ini melalui perpanjangan kontrak kedua yang dimulai pada Desember 2021, pihak penyelenggaraan yaitu Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) menandatangani perpanjangan kontrak resmi hingga tahun 2030 dengan Formula One Group (Formula 1, 2021). Kesepakatan ini status Abu Dhabi sebagai tuan rumah akhir musim F1 sekaligus mendorong Uni Emirat Arab untuk menunjukkan dirinya sebagai pusat pariwisata, olahraga, dan inovasi serta mendukung Uni Emirat Arab sebagai negara yang kompetitif secara ekonomi. Dampaknya juga terlihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Abu Dhabi GP sebagai penutup musim F1 yang memicu lonjakan turis telah membuat UEA menetapkan status sebagai pusat global (Rihlat Travel News, 2025).

Tahun	<i>Gross Domestic Product (GDP)</i>
2021	\$415.18 miliar

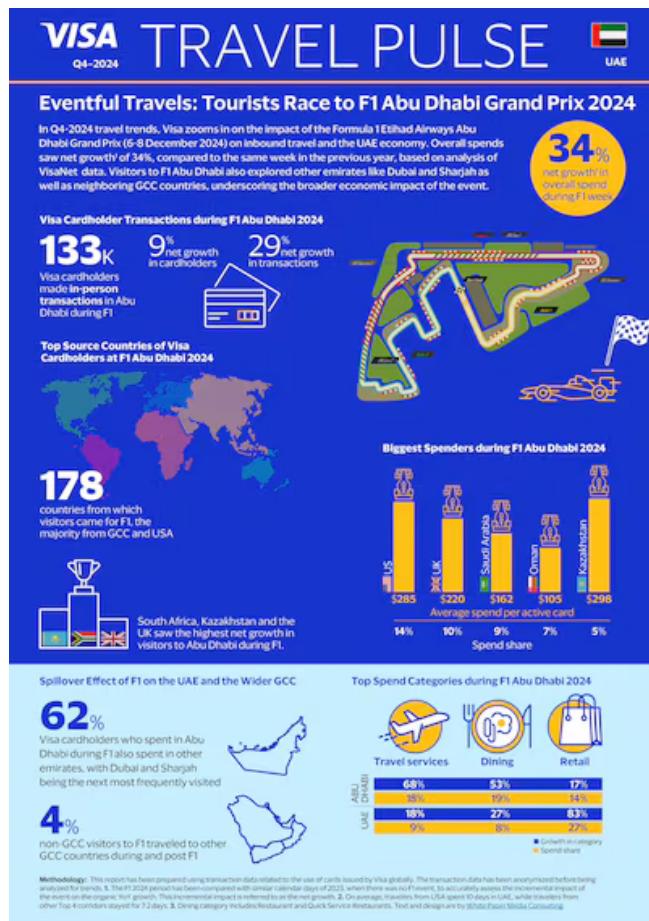
2022	\$502.73 miliar
2023	\$514.13 miliar
2024	\$537.08 miliar

**Tabel 1. 1** data statistik GDP Uni Emirat Arab

Sumber: (World Bank, 2025)

Secara makro, menurut data statistik World Bank terdapat data lonjakan yang signifikan yakni kenaikannya mencapai \$122 miliar dari tahun 2021 hingga 2024 (World Bank, 2025).

Kenaikan perekonomian UEA dikarenakan kontribusi dari faktor diselenggarakannya F1 Abu Dhabi GP. Tercatat UEA kedatangan turis internasional 28,15 juta pada tahun 2024 menandai adanya lonjakan dari tahun sebelumnya yaitu 22,65 juta (Travel and Tour World, 2025). Menurut data yang dirilis oleh World Travel & Tourism Council (WTTC) sektor pariwisata di UEA menyumbang sekitar Arab Emirates Dirham (AED) 257,3 miliar terhadap perekonomian UEA dan mendukung 898.600 lapangan pekerjaan. Pengeluaran wisatawan internasional mencapai AED 217,3 miliar terjadi pada tahun 2024 (WTTC, 2025). Pada tahun 2024, sebanyak 190.000 penonton memasuki gerbang sirkuit F1 selama akhir pekan *Abu Dhabi Grand Prix*, yang merupakan penonton akhir pekan terbesar di Sirkuit Yas Marina sejak *Abu Dhabi Grand Prix* tahun 2017 (F1 Destinations, 2024).



**Gambar 1. 2 Data turis internasional pengguna kartu Visa di Uni Emirat Arab tahun 2024.**

*Sumber: (The National, 2025)*

Dilansir dari data yang dirilis oleh VisaNet, mengatakan bahwa *Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix* menarik 133.000 pemegang kartu visa seluruh dunia dan memberikan dampak besar. Ajang F1 menunjukkan peningkatan bersih sebesar 34% dalam pengeluaran wisatawan di Abu Dhabi. Peningkatan pengunjung sebesar 9% dan peningkatan transaksi sebesar 29%. Dampaknya meluas ke luar ibu kota, dengan 62% dari pengunjung ini juga berbelanja di kota-kota lain UEA, terutama Dubai dan Sharjah. Di bagian lain, 4% pengunjung melanjutkan perjalanan mereka ke negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) lainnya setelah acara yang menunjukkan peningkatan pariwisata regional (The National, 2025). Untuk pemegang kartu dari Amerika Serikat rata-rata mengeluarkan \$285, Kazakhstan \$298, Inggris \$220, Arab Saudi \$162, dan Oman \$105. Efek spillover yang signifikan terjadi selama akhir pekan F1 di emirat-emirat lain, dengan pengunjung

menghabiskan rata-rata tambahan \$563 per kartu. Bagian terbesar ada pada Arab Saudi dan Amerika serikat yang masing-masingnya menghabiskan \$712 dan \$616 per kartu. Pola pengeluaran dari pengunjung F1 di Abu Dhabi membelanjakan uangnya untuk layanan perjalanan dan makan. Layanan perjalanan meningkat sebesar 68% dan pengeluaran makan juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 58% di Abu Dhabi. Untuk pengeluaran di seluruh UEA, layanan perjalanan mengalami peningkatan 18% dan pengeluaran makan meningkat sebesar 27%. Terdapat lonjakan peningkatan pengeluaran untuk bagian ritel sebesar 83% dari total pengeluaran di seluruh UEA selama akhir pekan F1 (The National, 2025).

Pada penyelenggaranya, acara olahraga balap internasional tidak hanya menjadi sekadar ajang kompetisi adu kecepatan mesin, tetapi juga dapat menjadi alat dalam membangun citra dan perekonomian UEA. UEA yang menjadi tuan rumah pada ajang balap F1 juga dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan sektor pariwisata yang signifikan. Ribuan penonton yang hadir langsung ke Sirkuit Yas Marina dapat memberikan lonjakan turis ke beberapa pariwisata di sekitaran sirkuit seperti penerbangan, perhotelan dan juga perdagangan (World Tourism Forum, 2025). Siaran global juga dapat menjadikan F1 sebagai sarana promosi wisata secara tidak langsung. Citra yang dimiliki oleh UEA sebagai negara modern juga ikut terbangun seiring keterlibatan dalam penyelenggaraan event berskala internasional (FIA, 2024).

Terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan diplomasi publik melalui acara olahraga dari **Leveraging Sports for Public Diplomacy Outcomes: The Case of Qatar's FIFA World Cup 2022** karya Alioune Aboutalib Lo tahun 2023 yang meneliti tentang Qatar yang menggunakan Piala Dunia FIFA 2022 untuk meningkatkan citra dan legitimasi internasionalnya. Pada penelitian ini Qatar melakukan reformasi seperti perubahan pada sistem Kafala dan investasi besar-besaran pada infrastruktur dan teknologi. Hasil penelitian

menunjukkan persepsi global secara positif sebagai tuan rumah yang cakap dan modern (LÔ, 2023). Penelitian kedua yaitu berjudul **Influence and Norm Entrepreneurship: Azerbaijan's Strategic Deployment of Soft Power** karya Asgarov Sirus tahun 2024 yang meneliti tentang bagaimana Azerbaijan menggunakan Soft Power untuk meningkatkan pengaruh globalnya menggunakan aliansi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan diplomasi publik. Hasil dari penelitian ini Azerbaijan memiliki peningkatan hubungan diplomatik yang lebih baik dan citra nasional yang lebih kuat meskipun masih ada tantangan terkait hak asasi manusia di negaranya (Sirus, 2024). Penelitian ketiga yaitu dari karya Jonathan Grix dan Michael Brannagan pada tahun 2024 yang berjudul **Sports Mega-Events as Foreign Policy: Sport Diplomacy, “Soft Power,” and “Sportwashing”** yang membahas bagaimana negara-negara menggunakan acara olahraga berskala internasional sebagai alat kebijakan luar negeri dalam memperkuat diplomasi olahraga, kekuatan lunak (*soft power*), dan strategi pencucian citra atau *sportwashing*. Grix dan Brannagan menyoroti bahwa negara seperti Qatar, Rusia, dan Cina tidak hanya mengejar prestise internasional, tetapi juga berusaha membentuk persepsi global yang menguntungkan, meskipun seringkali menutupi pelanggaran hak asasi manusia atau praktik otoriter di dalam negeri. Acara olahraga besar kini menjadi arena strategis dalam politik global modern Dari tinjauan penelitian yang telah dilakukan, banyak membahas mengenai olahraga sebagai alat bagi sebuah negara untuk melakukan diplomasi publik atau kekuatan lunak (Grix & Brannagan, 2024). Oleh karena itu penulis menentukan adanya pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni ruang lingkup fokus penelitian dan studi kasus yang digunakan. Penelitian ini berfokus mengenai diplomasi publik Uni Emirat Arab dengan studi kasus acara olahraga internasional yaitu Formula 1.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan rumusan masalah yang kemudian dijawab dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana upaya diplomasi publik yang dilakukan Uni Emirat Arab melalui Formula One Abu Dhabi Grand Prix tahun 2024?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 dari program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab melalui kacamata diplomasi publik dalam penyelenggaraan Formula 1 Abu Dhabi Grand tahun 2024.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan meningkatkan kesadaran di antara para pembaca mengenai pemanfaatan diplomasi publik oleh Uni Emirat Arab melalui penyelenggaraan acara olahraga balap. Harapan penulis, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para akademisi di bidang hubungan internasional dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis.

## **1.4 Kerangka Teori**

### **1.4.1 Diplomasi Publik**

Pada masa Perang Dunia II terdapat gagasan yang menegaskan bahwa pemerintah harus menjalin kontak dengan rakyat negara lain yang sering disebut dengan perang psikologis. Hal ini digambarkan dengan bagaimana tentara dari satu negara yang berperang mengukir pesan untuk mematahkan keinginan untuk terus berperang.

Sebelum adanya radio ditemukan, publik asing sulit untuk dijangkau dan diplomasi memiliki interpretasi antarpemerintah yang sangat terbatas. Aktor tunggal kerap bermain peran dalam kontribusi diplomasi berbagai negara pada abad-abad ini yang merujuk kepada hubungan formal. Pada dunia kontemporer yang kaya akan informasi, sikap masyarakat memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap keputusan pemerintah mereka. Diplomasi telah menjadi salah satu cara agar sebuah pemerintahan menjalin kontak dengan rakyat negara lain. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi dengan penduduk negara lain. Lanskap geopolitik kontemporer ditandai dengan pendekatan diplomasi bercabang dua, yang menandai pergeseran dari model antar pemerintah tradisional (Roberts, 2007).

Istilah diplomasi publik dicetuskan oleh Edmun Gullion pada tahun 1965. Edmund Gullion mendefinisikan diplomasi publik sebagai sarana yang menghubungkan dengan sikap publik terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Ini mencakup aspek-aspek yang berbeda dari diplomasi tradisional, pengaruh opini publik oleh pemerintah negara lain; hubungan antara kelompok swasta dan kepentingannya; pelaporan urusan luar negeri dan efeknya terhadap kebijakan; komunikasi antara orang yang bekerja sebagai koresponden dan diplomat asing, dan interaksi antar budaya (Cull, 2008).

Cabang pertama dari pendekatan ini dikenal sebagai “diplomasi tradisional”, sedangkan seiring berjalannya waktu terdapat cabang kedua yang disebut sebagai “diplomasi publik”. Diplomasi publik bermain peran penting pasca perang dingin. Sejak awal tahun 1950an para praktisi mencari istilah untuk kegiatan-kegiatan yang menunjukkan hubungan dengan kebijakan luar negeri dan menghindari pertikaian budaya-informasi. Diplomasi publik melibatkan upaya yang disengaja dan sistematis dari pemerintah untuk terlibat dengan khalayak asing. Berbeda dengan kegiatan antar

pemerintah konvensional, diplomasi publik merupakan perkembangan yang lebih baru yang bertujuan untuk membina hubungan positif dengan masyarakat asing, sehingga berkontribusi pada kerja sama internasional dan stabilitas global (Roberts, 2007). Seorang ahli diplomasi publik yaitu Nicholas J. Cull mendefinisikan diplomasi tradisional sebagai interaksi sebuah negara ke negara, sedangkan diplomasi publik adalah interaksi negara dengan masyarakat negara lain. Menurut Cull, adanya pergeseran terhadap fokus pendekatan aktor diplomasi dari “pemerintah ke pemerintah negara lain” menjadi “pemerintah kepada publik negara lain” (Cull, 2009).

Joseph Nye memperkenalkan pendekatan diplomasi untuk mempengaruhi orang lain atau mendapatkan hasil yang diinginkan tanpa adanya paksaan atau dengan kekuatan lunak. Kekuatan lunak yang ditumpu sebuah negara untuk melakukan pendekatan ini adalah sumber daya budaya, nilai, dan kebijakan yang dinamai dengan *soft power* (Nye, 2008). Didasarkan dari gagasan *soft power*, terdapat diplomasi olahraga merupakan sebuah konsep yang juga diperkenalkan oleh Joseph Nye. Joseph S. Nye mengatakan bahwa ‘*hard power*’ dengan ‘*soft power*’ saling terkait erat. Hilangnya *soft power* dapat menimbulkan hal buruk bagi *hard power*. Tokoh politik di banyak negara telah terpikat dengan konsep *soft power* dan berlomba-lomba untuk menggunakannya dengan efektif. Nye berargumen bahwa negara-negara yang dalam praktiknya tertarik untuk menyebarluaskan isu-isu dan budaya di luar negeri dan diperkuat oleh nilai-nilai kebijakannya dengan norma-norma internasional yang berlaku dapat lebih menarik dalam hubungan internasional. Diplomasi publik telah menjadi salah satu alat utama dari *soft power* dan hal ini diakui dalam praktik diplomatik jauh sebelum perdebatan tradisional mengenai diplomasi publik (Melissen, 2005).

Istilah “diplomasi publik” baru pertama kali digunakan pada tahun 1965 sebagai proses di mana pihak-pihak internasional berusaha mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka dengan melibatkan publik asing. Dalam tulisannya, Nicholas J. Cull dalam tulisannya yang dipublikasi pada tahun 2008 dengan judul “Public Diplomacy: Taxonomies and Histories” mengidentifikasi ada lima komponen utama dalam praktik diplomasi diantaranya, ialah;

*A. Mendengarkan (Listening)*

Listening atau mendengarkan adalah elemen yang mendahului semua bentuk diplomasi publik yang berhasil. Mendengarkan adalah upaya pihak-pihak untuk mengelola lingkungan internasional dengan mengumpulkan dan menyusun data tentang pendapat publik di luar negeri dan menggunakan data ini untuk menentukan kebijakan atau teknik diplomasi publik yang lebih luas. Hal ini secara tradisional telah menjadi elemen dari setiap praktik konstituen diplomasi publik, dengan advokasi, diplomasi budaya, pertukaran, dan *broadcasting* yang masing-masing menangani audiens dan penelitian terhadap opini mereka sendiri. Diplomasi konvensional dan pekerjaan intelijen juga telah digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang opini publik di luar negeri. Dalam bentuk paling dasar, ini berkaitan dengan aktivitas di mana aktor internasional mencari audiens asing dan melibatkan mereka dengan cara mendengarkan, bukan berbicara. Sangat umum untuk melihat diplomasi publik menanggapi perubahan pendapat internasional; namun, lebih sulit untuk mendengarkan atau memantau opini terstruktur di tingkat kebijakan tinggi.

*B. Advokasi (Advocacy)*

Dalam diplomasi publik, advokasi adalah upaya seseorang untuk mengelola dunia dengan melakukan kegiatan komunikasi internasional untuk secara aktif

mempromosikan kebijakan, ide, atau kepentingan umum sebuah negara di benak publik asing. Saat ini, hal ini mencakup hubungan pers kedutaan besar. Jenis hubungan ini lebih halus dan dapat mencapai tujuan kebijakan yang lebih cepat dan keras. Elemen ini dapat ditemukan di semua bidang diplomasi publik, dan kegunaan jangka pendeknya secara historis menempatkan elemen ini di tengah-tengah struktur diplomasi publik.

*C. Diplomasi Kultural (Cultural diplomacy)*

Upaya aktor untuk mengendalikan lingkungan internasional melalui pengenalan sumber daya dan pencapaian budaya mereka di luar negeri atau memfasilitasi transmisi budaya ke luar negeri dikenal sebagai diplomasi budaya. Secara historis, kebijakan suatu negara untuk memfasilitasi ekspor budayanya disebut diplomasi budaya. Secara historis, kebijakan suatu negara untuk memfasilitasi ekspor budayanya disebut diplomasi budaya.

*D. Diplomasi pertukaran (Exchange diplomacy)*

Mengirimkan warga negaranya ke luar negeri dan menerima warga negara dari luar negeri untuk studi, akulturas, atau timbal balik adalah apa yang disebut diplomasi pertukaran. Meskipun diplomasi publik dapat dianggap sebagai proses satu arah. Bersamaan dengan kerja budaya, pertukaran juga digunakan untuk tujuan kebijakan atau advokasi tertentu, seperti membangun atau meningkatkan interoperabilitas militer dengan sekutu. Dalam konteks diplomasi budaya, kepentingan komunikasi dua arah dan hubungan timbal balik kadang-kadang lebih penting daripada keinginan untuk menggambarkan budaya nasional.

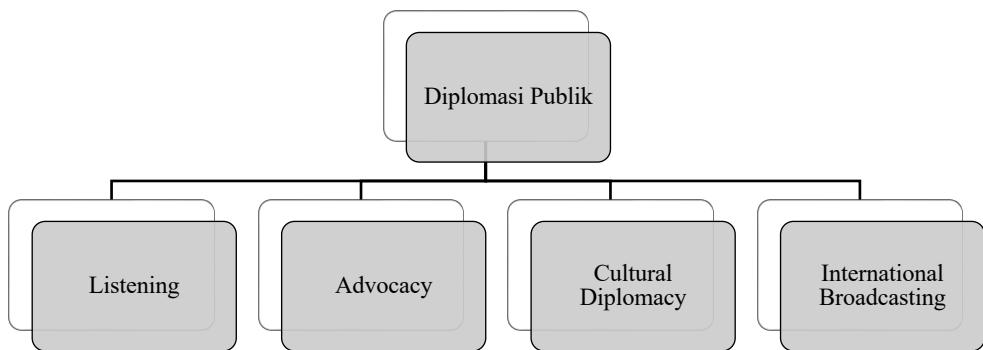
*E. Siaran Internasional (International broadcasting)*

*International broadcasting* adalah upaya untuk menngelola lingkungan internasional dengan menggunakan teknologi radio, televisi, dan internet untuk

terlibat dengan publik asing. Semua fungsi diplomasi publik lainnya, termasuk mendengarkan dalam fungsi pemantauan dan penelitian khalayak; advokasi atau informasi dalam editorial atau siaran kebijakan; diplomasi budaya; dan pertukaran program dan staf dengan lembaga penyiaran lain adalah contoh dari pekerjaan *international broadcasting* oleh negara. Persyaratan teknologi *international broadcasting* membuat praktik ini biasanya diatur secara institusional dari fungsi diplomasi publik lainnya. Namun, dasar struktural dan etika dari komponen utamanya, yaitu berita, adalah alasan utama mengapa *international broadcasting* harus dipertimbangkan sebagai praktik independen dari fungsi diplomasi publik lainnya.

Menurut penjelasan atas teori di atas, semua komponen diplomasi publik penting bagi negara menekankan aspek tertentu dari diplomasi publik, struktur yang ideal akan menyeimbangkan semua aspek dan memberikan ruang cukup bagi masing-masing untuk memberikan kontribusi yang diperlukan untuk keseluruhan. Namun, menurut Nicholas J. Cull, komponen-komponen dalam diplomasi publik tidak bersifat hierarkis dan tidak saling bergantung satu sama lain, sehingga dapat digunakan secara fleksibel sesuai konteks (Cull, 2008). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memilih menggunakan teori diplomasi publik dari Cull karena dianggap paling sesuai untuk menganalisis strategi diplomasi publik dari Uni Emirat Arab dalam menggunakan F1 sebagai alat diplomasi publiknya.

## 1.5 Sintesa Pemikiran



**(Sumber: diolah oleh penulis)**

Penulis menggunakan teori diplomasi publik untuk memahami bagaimana sebuah negara menyelenggarakan acara olahraga balap internasional. Dikarenakan oleh banyaknya peminat olahraga di seluruh dunia, pemerintah mulai mengambil keuntungan dari acara olahraga berskala internasional. Dalam mengkaji hal ini, penulis menggunakan teori diplomasi publik dengan lima komponen upaya dari Nicholas J. Cull yaitu *listening* sebagai upaya untuk mengelola atau menggunakan data dari pendapat publik untuk menentukan kebijakan atau teknik diplomasi publik yang lebih luas, *advocacy* sebagai sarana melakukan kegiatan komunikasi internasional untuk mempromosikan kepentingan umum negara, *cultural diplomacy* sebagai pengenalan dan penerapan budaya secara lebih luas, dan *international broadcasting* sebagai upaya untuk mengelola ruang lingkup internasional menggunakan teknologi seperti siaran televisi/radio dan internet untuk terlibat di publik asing.

## 1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, penulis akan mengambil argumen utama, yaitu bahwa Uni Emirat Arab berusaha melakukan diplomasi publik melalui acara olahraga balap Formula 1 untuk meningkatkan citra positif dan legitimasi internasionalnya yang dianalisis dengan menggunakan empat komponen diplomasi publik antara lain; *listening*, *advocacy*, *cultural diplomacy*, dan

*international broadcasting*. Dalam upaya *listening* menganalisa bagaimana respon UEA terhadap aspirasi global untuk menyusun sebuah kebijakan seperti melakukan membuat keputusan pelaksanaan dan perpanjangan kontrak F1 di Abu Dhabi. Selanjutnya, untuk *advocacy* bagaimana UEA melakukan kebijakan di Sirkuit Yas Marina untuk mendukung keberlanjutan lingkungan yang didukung oleh FIA dan pengelola Sirkuit Yas Marina. Pada *cultural diplomacy* Abu Dhabi Grand Prix 2024 mengandalkan budaya UEA seperti penggunaan elemen dekoratif tradisional sebagai pendekatan tradisional dari warisan lokal dan promosi wisata yang didukung oleh pergelaran F1 di Abu Dhabi untuk mengakses ke beberapa tempat wisata khas seperti, Louvre Abu Dhabi. Pada *international broadcasting*, Uni Emirat Arab melakukan penyebaran siaran kepada penonton Formula 1 dengan memanfaatkan saluran resmi dari media internasional seperti *BeINSport*. Penulis tidak menggunakan elemen *exchange diplomacy* karena UEA tidak pernah mengirimkan satupun warga negaranya ke luar negri untuk studi atau proses akulturasi mengenai F1 dan *exchange diplomacy* karena elemennya tidak relevan untuk dimasukkan ke diplomasi publik oleh UEA.

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada siapa, apa, dan di mana peristiwa terjadi dengan dasar menggunakan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya (Kim, Sefcik, & Bradway, 2017). Penelitian ini dipilih karena peneliti mencoba untuk mengerti dan mendalami studi kasus yang dipilih dan kemudian diinterpretasikan serta memberikan kesimpulan pada objek yang sedang diteliti sesuai dengan konteks. Tipe penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan studi kasus yang

digunakan dan memberikan makna atas gejala yang tampak mengenai peristiwa, siapa yang terlibat, dan dimana hal-hal itu terjadi (Fauzi, Nisa, & Napitupulu, 2022).

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini membatasi jangkauan penelitian berdasarkan isu yang akan dibahas, aktor yang terlibat dan wilayah yang diteliti. Fokus masalah terbatas pada upaya pemerintah UEA untuk meningkatkan pariwisata dengan menyelenggarakan Abu Dhabi GP dan dijelaskan menggunakan diplomasi publik. Penelitian ini dibatasi juga pada pemerintah UEA yang bertindak sebagai tuan rumah acara olahraga dan FIA yang bertanggung jawab atas kompetisi F1 sebagai aktornya. Area penelitian ini berada di UEA. Selain itu, terdapat fokus waktu yang dipilih oleh penulis yaitu 2024 dikarenakan terdapat kenaikan kunjungan turis dengan selisih 5,5 juta wisatawan internasional dari tahun sebelumnya serta telah dilaksanakannya F1 di Abu Dhabi GP selama 15 kali.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah menggunakan teknik studi literatur. Studi literatur merupakan jenis penelitian di mana peneliti mengumpulkan berbagai buku atau sumber yang berkaitan dengan subjek. Referensi yang ditemukan berasal dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs web di internet (Danial & Wasriah, 2009). Jenis data yang digunakan ialah jenis data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, hingga situs resmi akan ditelusuri melalui dokumen resmi, serta perjanjian resmi oleh pemerintahan yang terverifikasi dengan sumber kredibel sebagai pembantu penelitian.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan dan mengolah data secara non-numerik. Pada metode ini data yang telah dikumpulkan akan

dolah sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Fauzi, Nisa, & Napitupulu, 2022). Metode ini dipilih karena mampu mendeskripsikan strategi diplomasi publik terhadap upaya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dalam memanfaatkan Formula 1.

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Teknik penulisan pada penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab utama, yang diikuti dengan sub-bab lainnya. Hal ini bertujuan agar pembahasan runtut dan teratur sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

**Bab I** atau pendahuluan diisi dengan garis besar atau gambaran pada penyusunan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan konseptual, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan. Bab ini berperan sebagai gambaran garis besar penyusunan.

**Bab II** yang berisi dengan pembahasan yang akan disusun dan dikumpulkan dari data-data yang diperoleh dan dianalisa. Menjadi bab pembahasan mengenai pelaksanaan diplomasi publik Uni Emirat Arab dalam acara olahraga balap Formula 1 yang telah dianalisis lebih dalam dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu, Taksonomi Diplomasi Publik, *listening* dan *advocacy*.

**Bab III** menjadi bab pembahasan mengenai pelaksanaan diplomasi publik Uni Emirat Arab dalam acara olahraga balap Formula 1 yang telah dianalisis lebih dalam dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu, Taksonomi Diplomasi Publik, *cultural diplomacy*, dan *international broadcasting*.

**Bab IV** berisikan dengan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian beserta saran.